

MATRIK RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG	SASARAN	OUTPUT	OUTCOME	USULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tata Usaha Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Tata Usaha Biro Pemerintahan	5 Kegiatan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	2.000.000.000
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset			1 Kegiatan		100.000.000
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			1 Kegiatan		100.000.000
	- Penyediaan Barang dan jasa perkantoran			1 Kegiatan		850.000.000
	- Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah			1 Kegiatan		750.000.000
	- Peningkatan kapasitas aparatur			1 Kegiatan		200.000.000
2	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	- PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Kerjasama Daerah yang optimal	6 Dokumen	presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Satuan: 100%)	450.000.000
	- Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah			1 Dokumen		50.000.000
	- Penyelenggaraan Kerjasama Daerah			5 Dokumen		400.000.000
3	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	- PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah - Permendagri No 59 Tahun 2019 tentang Tatacara Perjalanan Luar Negeri di Lingkungan kemendagri dan pemerintahan daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri yang optimal	3 Dokumen	presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Satuan: 100%)	350.000.000
	- Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri			1 Dokumen		150.000.000
	- Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri			2 Dokumen		200.000.000
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan - Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan bagi masyarakat	5 Dokumen	presentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan (Satuan: 100%)	500.000.000
	- Penyusunan perumusan kebijakan teknis kecamatan dan kelurahan			1 Dokumen		100.000.000
	- pembinaan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan			4 Dokumen		400.000.000
5	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	- Permendagri No 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah	Meningkatnya Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah yang optimal	5 Kegiatan	presentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan (Satuan: 100%)	650.000.000
	- Administrasi batas daerah			2 Kegiatan		200.000.000
	- pembangunan dan Pemeliharaan pilar batas			2 Kegiatan		250.000.000
	- Pengadaan peta administrasi wilayah dan batas daerah provinsi banten			1 Kegiatan		200.000.000
6	Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	- Undang-undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial - Permendagri Nomor 72 tentang Perubahan atas permendagri nomor 137 tahun 2009 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang optimal	5 Dokumen	presentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan (Satuan: 100%)	450.000.000
	- Administrasi Rupabumi			3 Dokumen		300.000.000
	- Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten			2 Dokumen		150.000.000

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG	SASARAN	OUTPUT	OUTCOME	USULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
7	Penataan Daerah Otonom	- Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Meningkatnya pelayanan Penataan Daerah Otonom yang optimal	4 Dokumen	presentase realisasi kebijakan administasi pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan: 100%)	450.000.000
	- Penyusunan Kebijakan Penataan Daerah			1 Dokumen		150.000.000
	- Penataan Daerah Otonom			1 Dokumen		150.000.000
	- Penyelesaian Permasalahan Aset Antar Pemerintah Daerah			2 Dokumen		150.000.000
8	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Permendagri No 59 Tahun 2019 tentang Tatacara Perjalanan Luar Negeri di Lingkungan kemendagri dan pemerintahan daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi pemerintahan yang optimal	2 Dokumen	presentase realisasi kebijakan administasi pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan: 100%)	450.000.000
	- Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan			1 Dokumen		150.000.000
	- Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			1 Dokumen		300.000.000
9	Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang optimal	13 Dokumen	presentase realisasi kebijakan administasi pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan: 100%)	950.000.000
	- Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah			1 Dokumen		150.000.000
	- Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten			2 Dokumen		350.000.000
	- Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota			1 Dokumen		200.000.000
	- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota		9 Dokumen	250.000.000		
JUMLAH						6.250.000.000

Catatan :